



'SILA ELING' TERINTEGRASI JSS

Konsultasi Keluarga Bisa dari Rumah

YOGYA (KR) - Permasalahan yang terjadi di keluarga kini dapat dikonsultasikan secara daring. Warga Kota Yogya tidak perlu lagi harus datang langsung ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di kompleks Balaikota, melainkan dapat menyampaikan keluh kesahnya dari rumah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Edy Muhammad, menjelaskan pihaknya telah memiliki Sistem Layanan Konseling atau Sila Eling yang terintegrasi dengan Jogja Smart Service (JSS). "Layanan ini sebagai alternatif layanan konsultasi yang melengkapi layanan lain. Masyarakat tidak perlu datang langsung tetapi bisa berkonsultasi secara daring,"

jelasnya, Senin (8/8).

Layanan itu pun telah diluncurkan pada Sabtu (6/8) lalu di sela peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kota Yogya. Salah satu tujuannya ialah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam berkonsultasi. Dengan begitu, maka potensi kekerasan dalam rumah tangga pun dapat dicegah.

Edy juga memastikan kerahasiaan seluruh data pribadi warga yang mengakses layanan Sila Eling akan terjaga. Selain Sila Eling, pihaknya menyediakan pelayanan konsultasi maupun pelaporan kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui Telepon Sahabat Keluarga atau menu aplikasi Sikap yang terintegrasi di JSS. "Fasilitas pelayanan konsultasi juga disediakan melalui

Puspaga," imbuhnya.

Selama ini Puspaga memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan pelayanan konsultasi mengenai permasalahan keluarga. Terutama untuk menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak dan perempuan, serta pernikahan dini. Apalagi Puspaga memiliki jejaring dengan layanan psikolog di 18 puskesmas di Kota Yogya.

Penyediaan pelayanan konsultasi melalui Puspaga maupun aplikasi Sila Eling, imbuhan Edy, diharapkan bisa menekan angka kasus kekerasan maupun pernikahan pada usia anak di Kota Yogya. Kasus kekerasan pada anak pada tahun ini hingga Juni tercatat ada 29 kasus. Sedangkan sepanjang tahun lalu mencapai 40 kasus.

Sementara jumlah kasus pernikahan usia dini tercatat 64 kasus tahun lalu. "Kasus kekerasan pada anak hingga pernikahan usia dini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah menjaga ketahanan keluarga," tandasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, menjelaskan pihaknya memiliki komitmen dalam melindungi hak anak. Melalui Perda 1/2016 terkait kota layak anak, berbagai program terkait tumbuh kembang anak termasuk perlindungannya telah dijabarkan hingga wilayah. "Dengan diraihnya penghargaan Kota Layak Anak tingkat Utama pada tahun 2021 dan tahun 2022 merupakan prestasi semua pihak sebagai wujud komitmen yang kuat," katanya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005